

KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI MINGGU KEDUA JULI 2011

Pada 9 Mei 2011 DPR memulai Masa Persidangan IV tahun 2010-2011 setelah melewati Masa Reses III tahun 2010-2011. Masa sidang IV ini akan berakhir pada 22 Juli 2011. Konsentrasi kegiatan Dewan pada masa sidang ini tetap pada pelaksanaan di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Berikut ringkasan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan minggu kedua Juli 2011.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

Legislasi

Dalam minggu ini belum ada satu RUU-pun yang memasuki pembicaraan tingkat II. Artinya, belum ada RUU yang telah selesai dibahas. Namun demikian, beberapa hari kedepan, ada 3-4 RUU yang rencananya akan memasuki pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan. Oleh karenanya, Masa Sidang IV yang semula diagendakan ditutup pada 15 Juli, ditunda pada 22 Juli. Penundaan itu, selain untuk mengakomodir penyelesaian RUU APB-NP 2011, yang pada awal bulan baru diterima oleh DPR dari presiden, juga untuk menampung beberapa RUU yang sudah mendekati penyelesaian, terutama: RUU tentang BPJS. RUU tentang BPJS, sangat penting untuk dapat selesai pada masa sidang ini, karena proses pembahasannya sudah berjalan 2 kali masa sidang ditambah satu kali masa sidang, sehingga dianggap mutlak penyelesaiannya. Apabila tidak selesai maka RUU yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ini akan dihentikan dan mungkin baru boleh dibahas pada periode DPR yang akan datang. Untuk itulah, Pimpinan DPR melibatkan diri dalam kegiatan pembahasan ini manakala terjadi deadlock substansi materi pembahasna.

RUU lain yang sedang ditunggu adalah RUU tentang OJK. RUU ini, oleh Tim Perumus telah dilaporkan hasilnya kepada Panja. Tetapi, masalah Dewan Komisiner atau kelembagaan OJK masih pending dan materi ini akan dibahas intensif dalam rapat kerja pansus beberapa hari kedepan.

Dewan bersama Pemerintah juga telah berhasil me-



nyepakati mater-materi krusial RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Beberapa substansi penting yang telah disepakati dalam rapat kerja dengan Pemerintah, antara lain, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial (KY) dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim. Melalui perubahan UU ini, Dewan berharap KY dapat terus berperan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman

yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai UUD 1945.

Mengenai RUU tentang Bantuan Hukum, Dewan memandang bahwa setelah amandemen UUD 1945 terjadi penguatan konsep mengenai negara hukum (*rechtstaat*) di Indonesia, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Dengan disahkannya RUU tentang Bantuan Hukum, Dewan berharap UU ini menjadi jaminan terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan masyarakat lainnya.

RUU Perubahan atas UU No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu masih sedang dibahas secara intensif oleh Panja Komisi II. Terkait dengan ketentuan "tidak

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Helmizar **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **PENANGGUNG JAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

pernah menjadi partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan”, dikaitkan dengan: “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon” disepakati tidak menyebutkan jangka waktu pengunduran diri atau pengunduran diri pada saat mendaftar sebagai calon.

Terkait dengan ketentuan “larangan menduduki jabatan 5 (lima) tahun setelah menjabat, dan diberikannya kompensasi selama 5 (lima) tahun setelah menjabat serta ketentuan pidananya,” disepakati DIHAPUS.

Anggaran

Dalam minggu ini, tanggal 5 Juli, Ketua Banggar telah melaporkan mengenai hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN tahun 2012. Untuk pembahasan ini, Banggar telah membentuk 4 Panja dan telah melakukan koordinasi dengan Komisi-Komisi, utamanya Komisi VII dan XI. Pokok-pokok hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan diwujudkan melalui tema: Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Telah disepakati 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lain.

Pada hari yang sama, agenda rapat paripurna mendengarkan Keterangan Pemerintah mengenai pokok-pokok rancangan UU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2010. Pengajuan RUU ini ke DPR adalah untuk memenuhi ketentuan konstitusional yang diamanatkan dalam pasal 23E ayat 1 UUD 1945, pas 30 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan pasal 28 UU No. 47 tahun 2009 tentang APBN TA 2010, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 tahun 2010. Berdasarkan ketentuan UU tersebut, paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK untuk mendapatkan persetujuan DPR.

Pada tanggal 7 Juli, diagendakan pandangan fraksi-fraksi atas keterangan pemerintah, dan tanggal 11 Juli adalah tanggapan Pemerintah terhadap fraksi-fraksi atas materi RUU ini. Selanjutnya dilakukan rapat-rapat kerja oleh Komisi-komisi DPR, termasuk telaahan oleh BAKN DPR. Direncanakan baru pada minggu ke-4 bulan Agustus 2011 diagendakan Rapat Paripurna DPR untuk mendengarkan laporan hasil pembahasan tingkat I dan persetujuan/peno-

lakan dari setiap fraksi secara lisan yang diminta oleh pimpinan Rapat paripurna dan pendapat akhir Pemerintah.

Laporan dari Tim Perumus Kesimpulan Rapat Kerja dalam rangka Pembahasan Laporan tentang Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II Tahun Anggaran 2011, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011, dan dilaporkan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran pada tanggal 5 Juli 2011 adalah sebagai berikut: [1] Kesepakatan Pembahasan Asumsi Ekonomi Makro Dalam Smt I APBN Tahun 2011 lihat tabel berikut:

No.	Indikator Eko Makro	2010		2011	
		APBN-P	Real. Smt I	APBN	Real. Smt I
1.	Pertumbuhan Ekonomi %	5,8	5,9	6,4	6,5*
2.	Inflasi %	5,3	5,1	5,3	5,5
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$)	9.200	9.193	9.250	8.747
4.	Tingkat Suku bunga SPN 3 Bln %	6,5	6,6	6,5**	5,1
5.	Harga Minyak (US\$/barel)	80,0	77,9	80,0	111,0
6.	Lifting Minyak (ribu barel/hari)	965	959	970	888

*Angka Perkiraan

**Suku Bunga SBI 3 Bulan



[2] Realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp387,6 triliun atau 45,6% terhadap APBN 2011, yang berarti lebih tinggi sebesar Rp. 50,0 triliun dari realisasi Semester I 2010 sebesar Rp. 443,7 triliun. [3] Realisasi PNBPN sebesar Rp. 109,3 triliun atau 43,6 % terhadap target APBN 2011, yang berarti lebih tinggi Rp. 3,4 triliun dari realisasi Semester I 2010 sebesar Rp. 105,9 triliun. [4] Realisasi Belanja Negara dalam Semester I 2011 mencapai Rp. 442,3 triliun atau 36,0 % terhadap target APBN 2011, yang berarti lebih tinggi Rp. 46,5 triliun dari realisasi Semester I 2010 sebesar Rp. 395,8 triliun (35,1% dari pagu APBN-P2010). [5] Dengan berbagai perkembangan diatas, maka realisasi APBN Semester I 2011 mengalami surplus sebesar Rp. 54,7 triliun, lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi surplus anggaran pada Semester I 2010 sebesar Rp. 47,9 triliun. [6] Realisasi Pembayaan dalam Semester I 2011 mencapai Rp. 62,4 triliun atau 50,1 % terhadap target APBN 2011, yang berarti lebih tinggi

Rp. 7,7 triliun dari realisasi Semester I 2010 sebesar Rp. 54,7 triliun (40,9% dari pagu APBN-P2010). [7] Prognosis Asumsi Ekonomi Makro dalam Semester II Tahun 2011, terlihat pada tabel berikut:

No.	Indikator Eko Makro	2010	
		Prognosa 2011	Perkiraan Keseluruhan
1.	Pertumbuhan Ekonomi %	6,5	6,5
2.	Inflasi %	5,±1	5,5
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$)	8.853	8.800
4.	Tingkat Suku bunga SPN 3 Bln %	6,1	5,6
5.	Harga Minyak (US\$/barell)	79,0	95,0
6.	Lifting Minyak (ribu barell/hari)	1.002	945

[8] Prognosis Pendapatan Negara dan hibah dalam Semester II 2011 ditargetkan sebesar Rp. 665,3 triliun, sehingga dalam keseluruhan tahun 2011, Pendapatan Negara dan hibah diperkirakan mencapai Rp1.162,3 triliun (105,2% terhadap target APBN 2011). [9] Prognosis Belanja Negara dalam Semester II 2011 ditargetkan sebesar Rp. 871,1 triliun, sehingga dalam keseluruhan tahun 2011, Belanja Negara diperkirakan mencapai Rp. 1.313,4 triliun (106,8% terhadap target APBN 2011). [10] Prognosis APBN dalam Semester II 2011 mengalami deficit sebesar Rp. 205,8 triliun, sehingga pada akhir tahun 2011, Pembiayaan Anggaran diperkirakan mencapai Rp. 151,1 triliun.

Pengawasan

Komisi III DPR telah melakukan RDP dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 6 Juli. Kesimpulannya, Komisi III mendesak BNN untuk lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum maupun pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di dalam Lapas/Rutan di seluruh Indonesia.

Komisi VI DPR telah melakukan Raker dengan Menko Ekuin, Menteri BUMN, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Dirjen Kekayaan Negara kemenkeu, dan Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas. Agenda rapat adalah pembahasan PMN (penyertaan modal negara) pada perusahaan BUMN strategis dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2012 dan RKP kebijakan Pemerintah dibidang Industri strategis.

Kesimpulan rapat: [1] DPR dan pemerintah sepakat untuk melakukan penyehatan BUMN strategis melalui pemberian PMN dan konversi SLA/RDI dari bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya untuk PT. Dirgantara Indonesia (persero), PT. PAL Indonesia (persero), PT. PINDAD (persero) menjadi

PMN, [2] Komisi VI dan Pemerintah sepakat memberikan PMN pada PT. Merpati Nusantara Airlines (persero) dengan catatan telah melalui kajian restrukturisasi oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset, [3] Komisi VI

meminta Pemerintah untuk mengevaluasi serta memperkuat jajaran direksi dan Komisaris BUMN strategis sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, [4] Komisi VI meminta pemerintah untuk melanjutkan langkah-langkah restrukturisasi dan memastikan berlangsungnya sinergi antar

BUMN dan melakukan pembinaan dan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan PMN serta memastikan berjalannya upaya-upaya penyehatan lainnya, [5] PMN dan rstrukturisasi untuk APBN 2012: PT. PPA, PT. Kertas Leces, Perum LKBN Antara, PT. IKI, PT. Dok Kodja Bahari, PT. Balai Pustaka, PT. Perikanan Nusantara, akan segera dikaji dalam Panja PMN dan Restrukturisasi Komisi VI DPR.

Diplomasi Parlemen

DPR RI saat ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Geopolitis Asia-Pasifik (APG) *Inter-Parliamentary Union (IPU)* periode 2010-2011. Kelompok geopolitis di IPU berfungsi memberi tanggapan dan memberi masukan terhadap program-program atau resolusi-resolusi IPU, serta menentukan masukan keanggotaan dari negara-negara Asia-Pasifik untuk berbagai badan atau komisi di IPU. yang APG terdiri dari 29 negara di wilayah Asia-Pasifik dan keketuaannya ditentukan berdasarkan urutan alfabet nama negara-negara anggotanya.

Terkait keketuaan tersebut, pada tanggal 14 Juli 2011 DPR RI akan menjadi tuan rumah APG Working Group Meeting di Gedung DPR RI. Pertemuan satu hari ini akan mengundang 10 negara anggota APG, yang terdiri dari perwakilan negara-negara Asia-Pasifik yang duduk di Komite Eksekutif IPU yaitu Korea Selatan, Vietnam, Kamboja, dan Kanada; dua negara Ketua APG sebelum Indonesia, yaitu China dan India; dua negara Ketua APG yang akan datang, yaitu Iran dan Jepang; serta dua negara undangan, yaitu Australia dan Thailand.

Pertemuan APG Working Group akan dibuka oleh Ketua DPR RI, Dr. H. Marzuki Alie, sebagai Ketua APG dan selanjutnya akan dipimpin oleh Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. (Wakil Ketua BKSAP), sebagai Anggota Komite Eksekutif IPU dan President IPU Women Coordinating Committee. Pertemuan working group kali

ini utamanya akan membahas mengenai masukan APG terhadap IPU Strategic Plan 2012-2017 dan menentukan arah ke depan APG agar dapat lebih solid dan berkontribusi positif lebih banyak terhadap kemajuan IPU di masa yang akan datang.

Dari negara-negara yang telah diundang untuk hadir pada *Working Group Meeting IPU Asia-Pacific Group (APG)*, enam negara telah mengkonfirmasi kehadiran mereka di pertemuan ini, yaitu Korea Selatan,

Kamboja, Kanada, Iran, Australia, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Indonesia sejauh ini telah memasukkan usulan amandemen terhadap Rules of Procedures APG yang akan dibahas dalam Working Group Meeting tersebut dan akan diputuskan pada Pertemuan APG di 125th IPU Assembly di Bern–Swiss, Oktober 2011. Selain itu, Delegasi Indonesia juga akan menyampaikan masukan dan komentar terhadap draft IPU Strategic Plan 2012-2017, untuk diformulasikan sebagai bagian dari masukan APG.

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Antisipasi Limpahan Pemulangan TKW

Komisi VIII DPR mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memprioritaskan program antisipasi limpahan pemulangan tenaga kerjawanita akibat moratorium yang diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 2011 nanti.

“Harus ada koordinasi dan kerjasama dengan kementerian dan lembaga khususnya kementerian tenaga kerja dan transmigrasi terkait dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang saat ini mengalami banyak masalah,” jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR Chairunnisa saat memimpin Raker dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, di Gedung Nusantara II, Rabu, (6/7).

Mengenai pemberdayaan perempuan, Dia mengatakan, perlu segera disusun kerjasama dengan pemerintah daerah sebagai upaya pemahaman pengarus utamaan gender (PUG), peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta tumbuh-kembang anak. “Perlu ada pelatihan pemahaman anggaran responsive gender (ARG) untuk DPR/DPRD seluruh Indonesia agar dapat bersinergi dengan eksekutif,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR dapat mendukung Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang perubahan rencana kerjadan anggaran kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI tahun anggaran 2011 sebesar 13,97 Miliar. Selanjutnya Komisi VIII DPR akan memperjuangkan penambahan alokasi anggaran pada RAPBNP.(si)/foto:iw/parle.



Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak



Komisi VI Dan Pemerintah Lakukan Penyehatan Empat BUMN Strategis

Komisi VI DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melakukan penyehatan BUMN strategis melalui pemberian Penyertaan modal Negara (PMN) dan Konversi SLA/RDI dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS), untuk PT.Dirgantara Indonesia, PT.PAL Indonesia, PT.PINDAD, PT.Merpati Nusantara Airlines.

Dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto, dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri negara BUMN, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Senin (4/7), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Rincian PMN tersebut antara lain PT Dirgantara Indonesia (DI) konversi utang (non cash) 2011 sebesar Rp1,45 triliun dengan realisasi penyertaan modal sementara 2011 sebesar Rp2,38 triliun.

Untuk PT Pindad terdiri dari PMN cash pada 2012 sebesar Rp696,7 miliar

dengan bunga pinjaman RDI sebesar Rp35,4 miliar dan utang jangka panjang ke pemerintah sebesar Rp241,8 miliar.

Sedangkan PT Pal untuk PMN cash APBN-P2011 sebesar Rp648,33 miliar dengan PMN cash sebesar Rp1,39 triliun pada 2012, dengan konversi utang subsidiary loan sebesar Rp462,9 miliar dan PMN cash utang APBN pada 2012 sebesar Rp193,37 miliar. Konversi utang rekening dana investasi sebesar Rp56,53 miliar dan konversi utang pokok dan denda sebesar Rp101,2 miliar.

Komisi VI dan Pemerintah juga sepakat untuk memberikan PMN ke-

pada PT.Merpati Nusantara Airlines sebesar Rp.561 miliar yang dimasukkan dalam APBNP 2011 setelah melalui kajian restrukturisasi oleh PT.Perusahaan Pengelola Aset.

Menurut Airlangga kebijakan tersebut dilakukan sehubungan dengan penyelesaian permasalahan yang dihadapi berbagai BUMN eks BUMN Industri Strategis yang mengalami kesulitan keuangan dan permodalan dikarenakan berbagai kebijakan masa lalu yang kurang memihak kepada BUMN, sehingga mengalami kesulitan dalam mempertahankan operasionalnya sementara dari sisi kepentingan nasional keberadaan BUMN tersebut masih sangat diperlukan.

Selanjutnya, Komisi VI meminta kepada Pemerintah segera mengevaluasi serta memperkuat jajaran Direksi dan Komisaris BUMN strategis sesuai dengan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selain itu Pemerintah diminta untuk melanjutkan langkah Restrukturisasi dan memastikan berlangsungnya sinergi antar BUMN, dengan melakukan pembinaan dan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan PMN serta memastikan berjalannya upaya penyehatan lainnya.

Sementara itu, PMN dan restrukturisasi untuk PT PPA, PT Kertas Leces, Perum LKBN Antara, PT IKI, PT Dok Kodja Bahari, PT Balai Pustaka, PT Perikanan Nusantara akan dikaji dalam panja PMN dan restrukturisasi Komisi VI DPR RI. (as) foto:ry/parle



Ketua komisi VI DPR Airlangga Hartarto

Ujian Nasional Dan Permasalahan Pendidikan Kita

Heboh pemberitaan media massa tentang Ujian Nasional (UN) akhir-akhir ini, tak lepas dari permasalahan pendidikan kita pada umumnya. UN yang semula dimaksudkan untuk mencapai standar kemampuan siswa, justru memunculkan berbagai persoalan.

UN merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, penyelenggaraan UN sering dipersoalkan, karena dinilai bertentangan dengan Pasal 58 Ayat (1): "Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan". Dalam forum rapat-rapat DPR, perdebatan yang terjadi adalah adanya ketentuan bahwa UN menjadi penentu kelulusan siswa, sedangkan dalam kenyataan, belum semua siswa di Indonesia memiliki kualitas yang sama.

UN 2010/2011 telah diselenggarakan dengan formula baru. Formula baru tersebut menggunakan sistem penilaian terpadu, yaitu menggabungkan nilai UN dengan nilai sekolah (NS). Nilai Sekolah adalah gabungan nilai ujian sekolah ditambah nilai rapor semester 1-4. Nilai gabungan NS dengan UN tersebut ditetapkan minimal 5,5 dimana masing-masing memiliki bobot: UN 60% dan NS 40%. Formula baru ini menjadikan UN ulangan ditiadakan dan juga menguntungkan pemerintah, karena dapat mengifisiensi waktu dan anggaran. Sistem kelulusan UN 2011 mengacu pada Permendiknas No. 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UN. Namun demikian, walau telah menggunakan formula baru yang lebih longgar, ternyata masih saja ada penyimpangan dan kecurangan. Selain kebocoran soal, penyelenggaraan UN 2011 juga ditandai adanya pencon- tekan massal yang sangat tidak etis dalam dunia pendidikan, apalagi menyangkut peserta didik yang masih anak-anak.

Pendidikan Orde Baru sampai Reformasi

Berbicara masalah UN, kita perlu menoleh ke masa Orde Baru. Pada tahun 1971, pemerintah Orde Baru mengganti "Ujian" dengan EBTA. Sekolah diberi kewenangan penuh untuk meluluskan siswanya. Hasilnya luar biasa, hampir semua sekolah berhasil meluluskan siswanya seratus persen. Hal itu menimbulkan protes banyak kalangan, karena diduga EBTA penuh kecurangan. Pada tahun 1983



Oleh: DR. H. Marzuki Alie

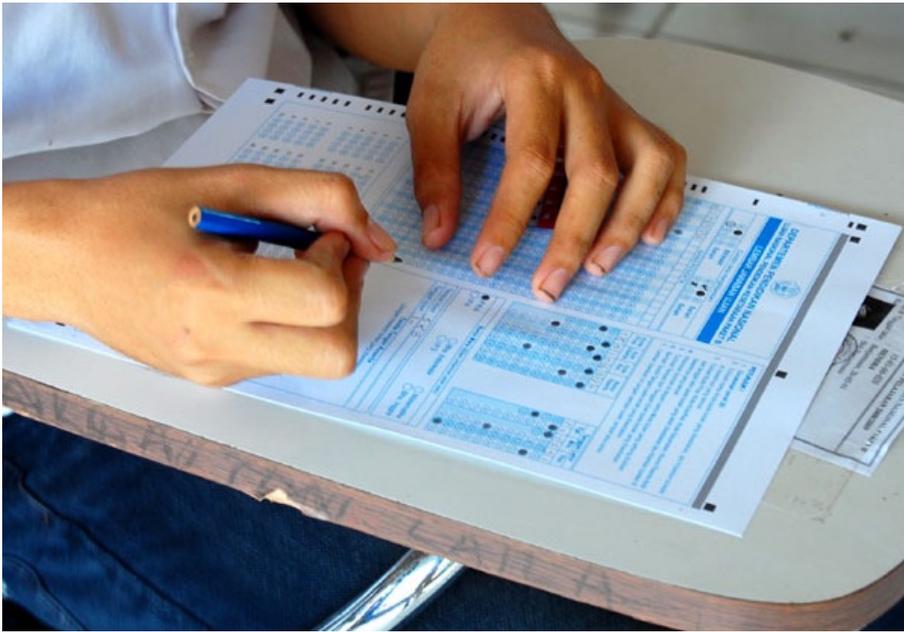


Suasana saat siswa SMU mengikuti UN

EBTA diganti dengan Ebtanas. Namun, di masa Orde Baru, fasilitas sarana dan prasarana pendidikan kondisinya lebih terkontrol karena masih menggunakan sistem sentralisasi pendidikan. Bahkan Presiden saat itu menggalakan program SD Inpres dan lain-lain, yang begitu memperhatikan kebutuhan pendidikan hingga ke pelosok-pelosok. Walau belum tentu dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan secara sempurna, namun keberadaan sekolah sampai titik terjauh dapat di-

pantau oleh pemerintah.

Memasuki masa reformasi, dunia pendidikan tetap saja diselimuti berbagai persoalan yang membelit, yang berdampak pada kualitas lulusan dan pendidikan secara keseluruhan. Standardisasi pendidikan yang ada sekarang lebih baik dibanding pada era Orde Baru meskipun tidak se-ideal harapan pembangunan pendidikan jangka panjang. Kita tidak memiliki dokumen perbandingan standarisasi pendidikan dari masa awal pendirian NKRI



dengan pendidikan terkini. Nama UN juga sering berubah, dari tiga presiden terakhir saja, nama UN telah berubah beberapa kali. Ujian Nasional (UN), Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan Nilai Ujian Akhir Nasional (NUAN), Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) dengan Nilai EBTANAS Murni (NEM). Ada juga EBTA, Ujian Akhir Sekolah (UAS). Penggunaan nama yang berubah-ubah menunjukkan terjadi perubahan pula atas formula yang dipakai.

Kebijakan Otonomi Daerah yang lahir pada masa reformasi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebenarnya ikut membuat pendidikan Indonesia makin memprihatinkan. Otonomi Daerah, hanya memindahkan permasalahan pendidikan dari pusat ke daerah. Kualitas pendidikan semakin sulit berkembang, karena pendidikan ikut dijadikan objek politik para elit daerah. Salah satu contoh adalah penetapan Kepala Dinas Pendidikan oleh Kepala Daerah, yang seringkali tanpa didasarkan pada kapabilitas seseorang, melainkan hanya karena kedekatan secara politik. Akibatnya pendidikan dikelola secara serampangan karena orang yang berada di pucuk pimpinan pendidikan di daerah bukan orang yang memahami tugasnya. Kualitas guru di daerah rata-rata juga kurang baik, karena rekrutmen dilakukan secara tidak profe-

sional. Penerimaan calon guru dengan kolusi sudah dianggap umum, dan belum jelas akreditasinya.

Berkaitan dengan kesejahteraan guru, walaupun UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberi kesempatan kesejahteraan yang lebih baik kepada guru, namun pada kenyataannya belum semua guru dapat menikmatinya. Bagi guru PNS mungkin tidak lagi ada masalah, kesejahteraan telah meningkat dengan adanya sertifikasi, namun bagi guru swasta, tidaklah demikian, nasib dan kesejahteraan mereka sangat tergantung pada sekolah dan yayasan induknya. Para guru honorer pada umumnya dibayar secara tidak layak dan sangat tidak sebanding dengan profesinya.

Masalah krusial yang juga menjadi bagian dari pendidikan adalah masalah sarana dan prasarana pendidikan yang tidak lebih baik. Besarnya dana pendidikan tidak sebanding dengan peningkatan kualitas pendidikan, sementara birokrasi pendidikan makin ketat dan rumit. Anggaran Pendidikan 20% (APBN dan APBD) yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan UU, semula dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidik, hingga kini ternyata belum dapat diimplementasikan secara seimbang. Keadaan tersebut kemudian membuat

kita berpikir, apakah tidak lebih baik jika dilakukan sentralisasi pendidikan di tengah kebijakan otonomi daerah sekarang ini, atau sekurang-kurangnya sentralisasi terhadap tenaga pengajar/guru.

Evaluasi

Evaluasi terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan diamanatkan pada Pasal 57 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi: "(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan". Oleh karena itu, setiap langkah evaluasi hendaknya didasarkan pada prinsip untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, dengan demikian, setiap evaluasi adalah upaya untuk **mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik**.

Evaluasi yang sangat mendesak untuk dilakukan saat ini adalah: [1] **Evaluasi penyelenggaraan UN** (harus terus dicari formula terbaik untuk penyelenggaraan UN yang jujur); [2] **Evaluasi manajemen pendidikan** (dari desentralisasi menuju sentralisasi kembali, untuk menjauhkan pendidikan dari kegiatan politik praktis para elit kekuasaan daerah); [3] **Kualitas pendidikan** (untuk meningkatkan kualitas pengajaran dari guru kepada murid); [4] **Kualitas sarana dan prasarana pendidikan** (untuk menunjang pengajaran dalam rangka mencapai hasil belajar yang optimal); dan [5] **Peningkatan kesejahteraan pendidik** (bagi yang belum menikmati sertifikasi, agar para pendidik tenang dalam bekerja, dan agar mereka lebih dihormati karena tak berkesan kekurangan).

Evaluasi terhadap kelima unsur tersebut sangat penting diprioritaskan, karena kelima unsur tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam pencapaian kualitas pendidikan Indonesia secara keseluruhan.

DPR Desak Pemerintah Seriusi Persoalan Distribusi Kebutuhan Pokok

“Inflasi Juni 2011 yang sangat tinggi 0,55%, di atas perkiraan awal BPS yang sebesar 0,1%-0,2%, karena melonjaknya harga bahan pokok menjadi peringatan yang serius. Sekarang, memasuki Juli kita akan mendapatkan tekanan tambahan dari biaya sekolah, dan berikutnya Ramadhan dan Lebaran. Manajemen stock, terutama beras dan distribusi kebutuhan pokok yang baik mutlak dibutuhkan. Bulog, Kemendag dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus bekerja ekstra”, papar Kemal, di Gedung DPR, Senin, (4/7).

Dia mengingatkan inflasi yang terlalu tinggi akan berpengaruh buruk terutama bagi kelompok miskin. Kemal mencontohkan, kenaikan garis kemiskinan sebesar 10,39% dari Rp 211.726 menjadi Rp 233.740 per kapita per bulan selama Maret 2010-Maret 2011 adalah bukti beban yang harus mereka tanggung. “Untuk mendapatkan sekeranjang konsumsi barang untuk makanan setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita perhari, yang sama dari tahun sebelumnya mereka harus membayar 10,39% lebih mahal. Jadi walaupun toh ada kenaikan pendapatan tahunan sebesar 10%, karena inflasi yang tinggi, bisa jadi masih akan tetap miskin. Peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan, membutuhkan inflasi yang rendah”, jelasnya.

Menurut BPS, dari 66 kota, sebanyak 65 mengalami inflasi dan 1 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Ambon 3,76%, Sorong sebesar 2,35%. Inflasi terendah terjadi di Padang Sidempuan 0,04%. Sementara deflasi terjadi di Tanjung Pinang sebesar 0,57%. Bahan makanan masih mengalami penurunan secara keseluruhan sampai satu semester. Tapi pada Juni ini bahan makanan mengalami kenaikan tinggi sehingga mendorong inflasi.

Wakil Ketua Panja Inflasi dan Suku Bunga Komisi XI DPR RI, Kemal Azis Stamboel mendesak pemerintah menangani secara serius manajemen stock dan distribusi kebutuhan pokok.



Wakil Ketua Panja Inflasi dan Suku Bunga Komisi XI Kemal Azis Stamboel

Penyumbang inflasi tertinggi di Juni adalah beras. Sepanjang Juni beras menyumbang inflasi 0,07%, lalu ayam ras inflasi 0,07%, telur ayam inflasi 0,05%, ikan inflasi 0,4%, rokok inflasi 0,03%, dan emas perhiasan menyumbang inflasi 0,03%.

“Untuk bulan-bulan kedepan ini perlu dijaga dengan baik. Manajemen stok terutama untuk beras oleh Bulog perlu diperbaiki agar inflasi volatilite food tidak terjadi.. TPID juga harus berperan efektif, agar stock dan distribusi kebutuhan pokok didaerah semakin baik. Ini menjadi kunci penting”,

jelasnya.

Kemal juga mengingatkan tekanan inflasi kedepan masih akan tinggi terutama dari tekanan harga pangan (terutama harga beras), tekanan harga energi (akibat kemungkinan pengaturan BBM Bersubsidi dan kenaikan harga minyak), risiko bencana, biaya distribusi yang masih tinggi, tekanan untuk menaikkan suku bunga, dan ekspektasi publik yang terbiasa menaikkan harga. “Berbagai tekanan ini harus terus diwaspadai,”terangnya. (si)

foto:ry/parle

APBN 2012 Harus Berikan Proteksi di Sektor Pertanian

Anggota DPR Ma'mur Hasanuddin mengatakan, APBN 2012 harus mampu memberikan proteksi kepada dunia pertanian. Pasalnya, pelaku usaha mikro di sektor pertanian paling labil dibandingkan lainnya.



Anggota DPR Makmur Hasanuddin

“Pelaku Usaha Mikro yang paling labil adalah pelaku usaha pertanian dimana tingkat risikonya sangat tinggi, namun hasilnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Oleh karena itu, usulan pembebasan pajak dan bimbingan permodalan bagi pelaku usaha ini sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kedepan”, kata anggota dari PKS ini menanggapi pokok-pokok kebijakan fiskal tahun

2012 mendatang, di Gedung DPR, Selasa, (5/7)

Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun terlihat impor masih lebih tinggi dari ekspor. Tahun 2009, impor 15%, ekspor 9,7% ; tahun 2010, impor 17,3%, ekspor 14,9% ; 2011 diperkirakan impor 17,3% , ekspor 14,1%, dan perkiraan tahun 2012, impor 18,4% ekspor 15,3%. Selain itu penerimaan pemerintah dalam ringkasan APBN 2009 hingga 2011 sangat di dominasi penerimaan

perpajakan dibanding penerimaan bukan pajak yang tingkat perbandingannya tidak sampai sepertiganya.

Sebelumnya pemerintah telah menyampaikan asumsi APBN 2012 dengan pertumbuhan 6,5% - 6,9%, inflasi 3,5% - 5,5% dengan kondisi perkiraan menekan pengangguran terbuka menjadi 6,8% dan menurunkan angka kemiskinan 0,8% - 1,8% dari tahun 2010.

Untuk angka kemiskinan ini, sekali lagi pemerintah oleh Ma'mur diminta jangan hanya sekedar lips service. Kalo perlu harus di kampanyekan musuh bersama yang bernama kemiskinan dengan program produktif di masyarakat secara mikro. “Jangan hanya mencari citra kebaikan dengan memberi bantuan-bantuan tanpa arahan yang hanya bertujuan mendapat simpati dan keberpihakan politik, pungkas Ma'mur,” tambahnya.

Menanggapi uraian pemerintah terhadap politik anggaran ke depan, lanjutnya, sangat baik, terutama untuk keberlangsungan dunia usaha mikro. Pelaku usaha mikro ibarat bayi yang masih perlu dilayani, bukan malah diberi beban tugas seperti pajak

selain itu, tambahnya, Keberpihakan Anggaran yang dituangkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2012, perlu diterjemahkan secara detail untuk mendukung pelaku usaha mikro. “Dukungan ini jangan hanya sekedar lips service untuk memberikan harapan kosong semata,” tegasnya. (si foto:si

RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Ditentukan Kamis Depan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan memutuskan dilanjutkan atau tidaknya pembahasan RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan pada rapat pleno Baleg Kamis depan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub saat memimpin Rapat Panja, Senin (4/7) di gedung DPR.

Pro kontra seputar perlu tidaknya RUU ini dilanjutkan telah muncul pada rapat-rapat sebelumnya. Beberapa

fraksi bahkan meminta pembahasan RUU ini sebaiknya dipending dulu.

Pernyataan ini disampaikan dengan tegas oleh Hendrawan Supratikno dari F-PDI Perjuangan yang mengatakan, fraksinya meminta RUU ini sebaiknya dipending saja.

Menurut Hendrawan, keberpihakan RUU ini harus jelas dan tegas. Hal ini mengingat, nasib petani tembakau yang sudah sekian lama bergantung hidupnya dari hasil tanaman tembakau.

Sementara Bukhori Yusuf (F-PKS) mengatakan, fraksinya memandang penting RUU ini disempurnakan, tetapi tidak ditunda. Disempurnakan dalam konteks filosofi-filosofi yang didapat dari lapangan diakomodasi sedemikian rupa.

Bukhori berharap pengaturan di dalam RUU ini tidak mengorbankan terhadap para petani tembakau yang notabene merupakan sumber kehidupan utama. Karena itu, hendaknya tidak masuk kedalam kebijakan-kebijakan yang sifatnya merugikan kepada satu produksi dalam negeri. Tetapi di sisi lain, jangan sampai dampak yang bertentangan dengan kesehatan tidak diatur dalam RUU ini yang justru akan membahayakan negeri dan bangsa.

Memang, katanya, cukai yang dihasilkan dari rokok ini sangatlah besar, namun perlu dipastikan apakah cukai yang masuk kepada negara ini seimbang dengan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Bukhori menambahkan, kita tidak ingin RUU ini menjadi momok bagi satu industri terutama industri dalam negeri yang kemudian mengancam terhadap tutupnya industri kita. Untuk itu, RUU ini perlu dikaji lebih mendalam, apakah jika seseorang merokok maslahatnya lebih besar atau moderatnya yang lebih besar.

Sementara Taufiq Hidayat (F-PG)



Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub

mengatakan, dari awal fraksinya memahami bahwa subyek yang diatur dalam RUU ini mengandung kepentingan yang berbeda-beda. Maka menjadi mutlak bahwa sebuah RUU harus mampu menjembatani berbagai kepentingan yang ada.

Fakta di lapangan menunjukkan, sebagian besar penduduk di beberapa provinsi menggantungkan hidupnya dari hasil tanaman tembakau. Namun dari sisi kesehatan masyarakat, apa yang menjadi kekhawatiran terhadap produk tembakau juga menjadi kecenderungan global untuk dilakukan pengaturan-pengaturan.

Fraksinya, kata Taufiq, ingin melihat persoalan ini sejernih mungkin. Untuk itu, fraksinya meminta waktu untuk mendalami persoalan ini dan setelah dilakukan pembahasan internal, fraksinya akan menyampaikan secara resmi.

Jamaluddin Jafar (F-PAN) me-

ngakui RUU ini memang melibatkan banyak aspek terutama aspek ekonomi yang menyangkut masalah pekerja, masalah penghasilan petani, cukai nasional, perlindungan petani, kesehatan dan masalah hak orang untuk hidup di lingkungan sehat.

Dia mengingatkan, jangan sampai moderatnya lebih besar dari pada manfaatnya. Untuk itu, Fraksi PAN memandang perlu pembahasan RUU dilanjutkan. Dengan pertimbangan bahwa beberapa regulasi harus ditegaskan terutama mengenai tempat-tempat yang perlu diatur, masalah subyek yang merokok, edukasi kepada masyarakat yang mengingatkan bahaya rokok.

Senada dengan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Hanura juga memandang RUU ini sebaiknya dipending pembahasannya. (tt) foto:ry/parle

Paripurna DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban APBN 2010

DPR menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2010 untuk dibahas lebih lanjut. Hal tersebut mengemuka saat DPR mengadakan Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Anis Matta, di Gedung Nusantara II, Kamis, (7/7).

Fraksi PKS dalam pemaparannya oleh Ekcy Awal Mucharam menyetujui RUU APBN TA 2010

untuk ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya. pada kesempatan itu, PKS mengkritisi pemerintah agar

meningkatkan desain sisi operasi pengendalian internal keuangan negara. "Kita meminta pemerintah memberi-



Wakil Ketua DPR, Anis Matta

kan perhatian khusus dari Lembaga negara yang mengalami penurunan dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar dengan Pengecualian (WDP),"Jelasnya saat menjadi juru bicara pada sidang paripurna.

Dia mengatakan, perlu diperhatikan dari sisi penagihan dan pengalihan sektor perpajakan karena banyak terjadi ketidaksesuaian. selain itu, dalam laporan BPK, lanjutnya, telah terjadi pelanggaran terhadap UU yang sangat signifikan dalam tata berne-gara. "Kedua yaitu pencatatan uang muka bendahara negara yang tidak memadai tanpa disertai rincian yang jelas,"jelasnya.

Menurutnya, fenomena ini bagai gunung es dimana nanti akan terungkap pada tahun mendatang. selain itu pemerintah harus memberikan target waktu pengendalian pencatatan utang pajak dalam konteks reformasi birokrasi Kemenkeu dimana seharusnya tidak terjadi.

Sementara Eko Hendro Purnomo dari PAN mengatakan, kondisi tahun 2010 saat itu, cukup menggembirakan nilai tukar stabil dan pertumbuhan ekonomi 6.1 persen diatas APBN-P 5.8 persen."Masih terlihat terjadinya hambatan (bottle necking) ekonomi yang

harus dibenahi,"paparnya.

Eko mengaku kecewa terhadap kinerja dua lembaga yaitu kemendiknas dan Kemenkes yang mendapat opini BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Kedepannya, pemerintah harus lebih memperhatikan tata kelola keuangan Kementerian dan lembaga sehingga dapat menghindari terjadi indikasi kebocoran keuangan negara.

Menurut Eko, persoalan tata kelola disebabkan beberapa hal diantaranya persoalan penagihan, pencatatan penerimaan perpajakan, pencatatan uang muka bendahara negara, pelaksanaan inventarisasi Penerimaan. "Harus segera dicari format terbaik dalam pelaksanaan APBN sehingga menghindari penyalahgunaan keuangan negara,"paparnya.

Selain itu, perlu dilakukan pembinaan terhadap Kementerian dan lembaga dalam menyusun anggaran, serta prosedur dan inventarisasi aset tetap non belanja modal. "Perbaiki sistem pencatatan pajak dengan sistem pembayaran pajak sehingga dapat menghasilkan jumlah piutang yang akurat. inventarisasi PNPB masing-masing KL dan pemerintah, intensifkan hasil hibah terhadap KL, sosialisasi, monitoring dari pelaksanaan hibah,"tambahnya.

Dia mengatakan, perlu didorong skema BBM bersubsidi dan tepat sasaran, dan melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas, dan belanja yang tidak produktif.

Irna Narulita dari Fraksi PPP mengatakan,perlu diperhatikan beberapa hal seperti kemampuan kebijakan fiskal untuk kesejahteraan rakyat, re-kening pemerintah untuk transparansi, dan pengelolaan utang indonesia jangka pendek dan panjang. "Rendahnya realisasi penyerpaan anggaran disejumlah departemen, bermuara rendahnya fungsi anggaran untuk kesejahteraan rakyat,"terangnya.

Menurutnya, peningkatan anggaran harus diimbangi oleh penyerapan anggaran yang ditujukan untuk peningkatan laju ekonomi dan kesejahteraan rakyat. "Seharusnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi, memang ada kemajuan ekspor namun pemerintah kurang optimal dalam memberikan kontribusi pada sektor ekonomi. Aset kewajiban dan dana meskipun terdapat kemajuan neraca keuangan pemerintah dari sisi aset namun sisi kewajiban juga meningkat,"jelasnya.

PPP menilai, kondisi tersebut dapat menimbulkan posisi neraca keuangan pemerintah yang tidak seimbang khususnya kewajiban jangka pendek dan panjang dalam fleksibilitas pemerintah dalam anggaran.

Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicaranya Yati Iti Oktavia Jayabaya mengatakan, Partainya mengapresiasi hasil laporan BPK terhadap laporan 2010 dimana terjadi peningkatan opini terhadap Kementerian dan lembaga. "BPK memberikan opini WTP terhadap 53 RKA KL dan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009,"katanya.

SW Yudha (F-PG) mengatakan, yang perlu diseriusi pemerintah adalah penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka kemiskinan yang harus didorong dari sektor pertanian dan manufaktur dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. "Fraksi Partai Golkar juga meminta pemerintah menjaga uang beredar atau primer dan bahan-bahan pokok dengan mengacu target inflation frame work,"tandasnya. (si)/foto: iw/parle.

DPR RI Terima Mahasiswa-i ISAFIS

DPR RI menerima kunjungan 46 mahasiswa/i yang tergabung dalam Indonesia Students Assosiation for International Studies (ISAFIS).

Kegiatan ini merupakan pertama kalinya DPR RI menerima kunjungan mahasiswa/i asing oleh karena itu Humas DPR diharapkan semakin pro aktif mengundang organisasi Internasional sehingga mereka dapat memperoleh persepsi yang berbeda mengenai keparlemenan.

“Temen-temen dari ISAFIS merupakan kaum muda potensial yang sesungguhnya mereka sangat antusias ingin mengetahui tentang Indonesia, mulai dari sistem ketatanegaraannya maupun tentang DPR,” jelas Anggota DPR dari Theresia Pardede dari Partai Demokrat sesuai menjadi pembicara, di Gedung Operation Room, Senin, (4/7).

Menurut Tere biasa dipanggil, kedepan Biro Humas harus lebih pro aktif lagi mengundang organisasi internasional sehingga para pelajar Indonesia, maupun asing dapat memperoleh per-

spektif yang berbeda dengan media massa mengenai keparlemenan. “Selama ini kita melihat hanya refleksi dari media massa dan banyak tidak paham mengenai DPR,” jelasnya.

Dia mengatakan, kegiatan ini harus diperbanyak dan dipertajam sehingga persepsi masyarakat umum bisa lebih positif terhadap DPR. “Desain program itu ada di domain kehumasan, sebagai anggota BURT secara pribadi memiliki tugas mengawasi program yang ada,” kata Tere

Dirinya mengharapkan kegiatan ini dapat berdampak positif bagi DPR. Selain itu, tugas ini juga bagian dari bidang Komisi X DPR yang mengurus permasalahan kepemudaan. “Ini juga merupakan bagian dari komunikasi politik yang dilakukan dewan selama ini,” ujarnya.

Hambatan saat ini, lanjut Tere, DPR belum memiliki sistem yang jelas dan

akuntabel, karena itu perlu disusun sistemnya sehingga dapat terlihat kinerja anggota DPR secara kualitatif. “Alat ukur masih Prolegnas dan itu bersifat kuantitatif, belum ada parameter spesifik,” jelasnya. Selain itu, Ruang komunikasi publik penuh dengan agenda setting sehingga benak di masyarakat tentang DPR RI semakin terpuruk.

Perlu disusun strategis untuk memperbaiki kendala itu, tambahnya, pertama penguatan SDM di lembaga legislatif, baik SDM, infrastruktur serta manajemen organisasi DPR RI. “Kita kembali kepada semangat reformasi yang dikuatkan di lembaga legislasi, disini kendala yang kita temukan jawabannya karena kita menemukan pola baru suara terbanyak, yang sedikit banyak memberikan dampak negatif salah satunya yang kompeten di bidangnya,” tandasnya. (si)/foto:iw



Theresia Pardede (F-Demokrat) (Kanan)

Pemerintah Laporkan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2010 ke DPR

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/7) berkesempatan melaporkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2010 kepada DPR.



Menteri Keuangan, Agus Martowardojo

“Pengajuan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945, ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No.17

tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 28 UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN TA 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2010,” kata Menkeu.

Ia menambahkan, bahwa sesuai dengan ketentuan UU tersebut diatas, maka paling lambat 6 (enam) bulan

setelah berakhirnya tahun anggaran, Pemerintah dapat menyampaikan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang sebelumnya telah diperiksa oleh BPK kepada DPR guna mendapat persetujuan.

Sebelum disampaikan ke DPR, hasil pemeriksaan oleh BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atau qualified opinion atas LKPP tahun 2010. “Opini audit tersebut sama dengan opini atas LKPP tahun 2009 yang juga mencerminkan adanya upaya yang telah dilakukan Pemerintah secara konsisten untuk terus mempertahankan dan selanjutnya meningkatkan kualitas LKPP” ujar Menkeu.

Dalam laporannya, lanjut Menkeu permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas kewajaran LKPP Tahun 2010 diantaranya mengenai penagihan, pengakuan dan pencatatan penerimaan perpajakan, pencatatan Uang Muka Bendahara Umum Negara (BUN) tidak memadai, permasalahan mengenai pengendalian atas Pencatatan Piutang Pajak, dan permasalahan dalam pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset tetap.(nt) foto: ry/parle

Pemerintah Patut Pertimbangkan Revisi UU Perpajakan

Beragam temuan permasalahan perpajakan yang mengemuka ditengah publik penyebabnya mengarah pada lemahnya aturan perundang-undangan.

Apabila tidak segera dibenahi negara akan terus direpotkan dengan munculnya ‘gayus-gayus’ baru yang menggerogoti penerimaan keuangan negara dari sektor pajak.

“Saya meyakini dalam kondisi aturan sekarang akan tetap muncul

gayus-gayus baru. Saya menantang Dirjen Pajak, apakah sudah perlu merevisi UU Perpajakan ini walaupun baru disahkan tahun 2008. Perubahan ini mengarah pada bagaimana negara memperoleh pendapatan sebanyak banyaknya tapi juga memberi ruang

bagi pencari keadilan,” kata Harry Witjaksono anggota Panja Pemberrantasan Mafia Hukum dan Perpajakan (PPMHP) Komisi III dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2011).

Politisi Partai Demokrat ini melihat permasalahan pajak berputar pada beberapa kasus diantaranya pembayaran bisa diatur, pemalsuan dokumen, kesalahan data. Penyelesaiannya cenderung datang dari oknum petugas pajak karena paham ada lobang dari UU Perpajakan. Hal lain penyelesaian ka-



Anggota Panja dari F-PPDIP, Noerdin



Aboe Bakar Al Habsi (FPKS)

sus pajak melalui peradilan pajak yang tidak masuk peradilan umum baginya merupakan sistem tertutup yang tidak sesuai dengan demokrasi. Dalam revisi patut dipertimbangkan memasukkan pengadilan pajak ke dalam sistem peradilan umum.

Pendapat senada juga disampaikan anggota Panja dari FPDIP Noerdin. “Kabareskrim mengatakan dari pemeriksaan 151 perusahaan banyak yang tidak terkait kasus pidana tapi terkait ketentuan perpajakan yang domainnya Kementerian Keuangan. Ini menunjukkan seolah-olah penyelidikan terputus padahal dugaan kerugian negara banyak dilakukan oknum aparat pajak,” ujarnya.

Ia meminta dilaksanakan evaluasi perbaikan sistem kerja, pergantian peraturan yang banyak merugikan negara dan mengakibatkan penyimpangan kerja. Ditjen Pajak menurutnya perlu menjelaskan beberapa SOP yang tidak bisa diterapkan lagi serta upaya untuk memperbaikinya.

Sementara itu Aboe Bakar Al Habsi dari FPKS mengingatkan agar Panja

PMHP dapat menuntaskan pekerjaan dan menyiapkan laporan yang akan disampaikan pada rapat paripurna pada akhir masa persidangan ini. “Waktu tinggal 3 pekan dan harus kita laporkan pada rapat paripurna, ada permasalahan apa dalam perpajakan harus kita temukan,” tandasnya.

Ia juga meminta penjelasan kepada aparat kejaksaan yang dari informasi yang diperolehnya mengembalikan berkas 74 perusahaan terkait kasus Gayus. Baginya kondisi ini menunjukkan aparat bekerja tidak serius. Anggota Panja dari Fraksi Gerindra Martheen Hutabarat juga meminta kejaksaan serta aparat lain mencari jawaban yang sampai saat ini belum terungkap yaitu tentang kebijakan menahan Gayus di Rutan Brimob. “Yang jadi pertanyaan siapa yang menempatkan Gayus di Brimob. Fakta menunjukkan Gayus kemudian bisa berkali-kali keluar penjara.”

Dalam penjelasannya Dirjen Pajak Fuad Rahmany menyebut upaya perbaikan kedalam untuk mencegah munculnya ‘gayus-gayus’ baru telah dilakukan. Ia mengembangkan Whistle

blowingsistem untuk menghambat orang seperti Gayus dapat bekerja leluasa. “Sulit untuk menghilangkan oknum seperti itu tapi kita upayakan dalam waktu singkat 1 bulan saja bisa ketahuan,”katanya.

Sampai saat ini menurutnya aparat kepolisian sudah memeriksa 138 pegawai pajak yang diduga telah membantu Gayus dalam melakukan aksinya. Namun sejauh ini hasil pemeriksaan kepolisian tidak ada bukti yang dapat menjerat mereka. Dijelaskan pula hasil pemeriksaan Irjen Kementerian Keuangan yang telah memberi sanksi kepada 19 orang petugas. Sanksi bervariasi mulai dari dibebaskan dari jabatan sampai pada berlanjut ke persidangan.

Terkait wacana revisi UU Perpajakan Fuad mengatakan siap mengkaji peraturan perundangan yang sudah tidak sesuai. “Kita harus buka diri untuk melihat kembali UU itu yang pada saat dibuat lebih banyak menekankan wajib pajak terlindungi. Kalau itu menyangkut UU akhirnya memang harus dilakukan revisi,” jelasnya. (iky) foto: iw

Komisi V Minta APBN-P Kementerian PU Diprioritaskan Hal Yang Urgen

Komisi V DPR RI meminta APBN Perubahan (APBN-P) Kementerian Pekerjaan Umum diprioritaskan untuk hal-hal yang sifatnya urgen dan betul-betul manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.



Jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum

Hal ini mengemuka saat rapat dengar pendapat dengan Jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rabu (6/7) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR H. Mulyadi.

Mulyadi mengatakan, dari dana APBN-P ini, Kementerian PU hendaknya membuat program-program yang sangat mendesak. Namun dia mengingatkan, biasanya APBN-P baru dapat dicairkan sekitar bulan September, Kementerian PU juga harus memperhatikan waktu yang sangat singkat untuk menjalankan program tersebut. “Jangan sampai program yang telah ditentukan terhambat pelaksanaannya atau tidak selesai pada tahun anggaran 2011,” kata Mulyadi.

Terkait dengan anggaran, Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said menyoroti masih rendahnya daya serap anggaran di kementerian ini. Menurut Muhidin, daya serap anggaran Kementerian PU masih dibawah penyerapan rata-rata nasional. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian serius, meng-

ingat Kementerian PU termasuk salah satu dari tiga kementerian terbesar mendapatkan alokasi anggaran.

Muhidin juga menyoroti adanya rencana penghematan dan pemanfaatan anggaran sebesar kurang lebih Rp 2 triliun di kementerian ini. Menurut Muhidin, Kementerian PU harus hati-hati membuat program dari dana penghematan ini.

Program yang dibuat dari dana penghematan ini harus strategis, dapat berjalan baik dan harus dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dia mengusulkan, terkait dengan kebijakan moratorium yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebaiknya program yang dibuat berkaitan dengan keputusan tersebut. Seperti, perbaikan infrastruktur di pedesaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Muhidin melihat, kementerian ini masih menganggarkan dana untuk bencana alam. Menurutnya, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan dana untuk bencana alam sudah ada di Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Di sini terjadi tumpang tindih yang seharusnya dana tersebut dapat dialokasikan ke program lain,” kata Muhidin.

Pada kesempatan tersebut, Sekjen Kementerian PU Agoes Widjanarko menyampaikan rencana pemanfaatan dana penghematan di kementeriannya sesuai dengan ketentuan Inpres 7/2011 dan keputusan sidang kabinet.

Dana penghematan sebesar Rp 2,581 triliun akan digunakan untuk percepatan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur dan ketersediaan pangan.

Selain itu, mendukung implementasi inisiatif baru, antara lain untuk peningkatan kompetensi masyarakat konstruksi dan lembaga pengembangan jasa konstruksi.

Rencana lainnya, untuk mendukung program pro rakyat dan untuk program/kegiatan yang sifatnya mendesak, seperti untuk penanganan rehabilitasi/rekonstruksi kerusakan infrastruktur PU akibat bencana alam di Merapi, Wasiar, banjir bandang di Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Sedang APBN Perubahan Tahun 2011 diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran, pemenuhan kebutuhan, penyesuaian/pengurangan kelebihan alokasi PHLN dan blokir yang tidak dapat digunakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pemanfaatan penghematan yang memerlukan realokasi antar program.

Untuk menunjang program tersebut, hal-hal yang perlu diputuskan adalah kepastian waktu penetapan alokasi dana reward, kepastian besaran dan waktu penetapan alokasi anggaran hasil penghematan yang dapat dimanfaatkan kembali dan APBN-P.

Hal tersebut diperlukan mengingat semakin mendesaknya waktu pelaksanaan. Dengan adanya kepastian tersebut, persiapan pelaksanaan (tender) dapat dilakukan lebih awal. (tt)foto: Ry/parle

Usaha Penambangan PT Freeport Segera Dihentikan

Demikian yang dikatakan Anggota Komisi IVDPR Anak Agung Djaelantik, pernyataan ini disampaikan pada saat Rapat DengarPendapat Umum dengan Wakil Bupati Mimika Abdul Muis dan jajarannya, rapattersebut dilakukan di gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu, (06/07) siang.

Djaelantik juga mengatakan, masalah izin pinjam pakai kawasan hutan di Papua yang dipergunakan PT Freeport hingga sampai saat ini masih saja berdampak padapembangunan daerah yang tidak sama sekali menguntungkan rakyat secara keseluruhan, dan masih saja membuat masyarakat setempat menderita dan kurang sejahtera.

Menurutnya, dengan adanya PT Freeport di Mimika Papua mestinya masyarakatsetempat menjadi sejahtera dan berkehidupan yang lebih layak jika dibandingkandengan daerah lain, namun apa yang terjadi adalah sebaliknya, maka sebaiknya izinpenggunaan lahan oleh PT Freeport jangan diperpanjang lagi dan segera dihentikan pengoperasiannya, ungkap Djaelantik.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menambahkan, dari data Kementerian Kehutanan, bahwa dari 13 Perusahaan Tambang yang telah mendapatizin melakukan eksporasi di kawasan hutan lindung salah satunya adalah PT Freeport Indonesia, seluas 10.000 ha di Mimika ditambah 202.980 ha juga di Mimika, Paniaidan Jaya Wijaya Papua, yang telah dilakukan untuk kediatan penambangan secara terbuka di dalam kawasan hutan lindung.

Sehubungan dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, PT Freeport Indonesia, dari informasi terakhir PT Freeport sudah mendapat surat teguran dua kali namun hinggasaat ini PT Freeport masih saja mengabaikan surat tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menambahkan, bahwa latar belakangdibentuknya Panja PPKH (Pinjam Pakai Kawasan Hutan) PT Freeport Indonesia sampai saat ini belum memi-

Komisi IV DPR merasa prihatin atas terjadinya izin pinjam kawasan hutan pada PT Freeport yang berdampak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatyang masih saja menimbulkan masalah.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo

liki IPPKH, maka peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBK) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan belum bisa diberlakukan dan ini merugikan negara dari hasil PNBP.

Firman juga mengatakan, manfaat dan dampak langsung atas keberadaan PT Freeport Indonesia selama beroperasi di wilayah Papua belum nampak bagimasyarakat setempat, utamanya dalam peningkatan SDM dan ekonomi masyarakatsekitar areal pertambangan yang masih saja miskin.

Dikatakan juga bahwa masalah lingkungan yang terkena limbah dari PT Freeporttersebut membuat hilangnya vegetasi dan biodiversitas atau keanekaragaman hayati dikawasan hutan lindung yang dieksploitasi, serta pencemaran sungai, menurunnya kualitas air dan lingkungan hidup, serta rusaknya hutan mangrove di bagian hilir sungai.

Wakil Ketua komisi IV DPR Firman Soebagyo yang sekaligus memimpin rapatmengemukakan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dankawasan

hutan lindung, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai, dengan pertimbangan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Sementara Wakil Bupati Mimika Abdul Muis mengatakan, kapan Komisi IV DPR akan melakukan kunjungan spesifik Ke Mimika jangan memberitahukan kepada PT Freeport biar saja nanti saya yang memfasilitasi untuk tujuan tersebut, kata Abdul Muis.

Wakil Bupati Mimika Abdul Muis juga menambahkan, selama ini belum pernah adaAnggota DPR yang berkunjung ke Papua khususnya ke PT Freeport mereka pasti dibawa kelokasi-lokasi yang baik-baik saja bukan kelokasi yang diangkap bermasalah,dan selama ini PT Freeport selalu menunjukkan hal-hal yang baik-baik saja bukan yang jelek.

izin-izin HPH di Papua yang tidak membangun industri mutlak di cabut, untuk itu PT Freeport harus memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dalam kegiatan dia melakukan eksplorasi dan untuk keperluan eksploitasi dan kami akan lebih ketat lagi dalam masalah tersebut, ungkap Abdul Muis. (Spy). foto:ry/parle

Pemerintah Harus Konsisten Berikan Beasiswa Pelajar Berprestasi

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta Pemerintah konsisten memberikan beasiswa bagi para pelajar yang berprestasi sampai mereka dapat menuntaskan pendidikannya hingga tuntas dan cita-cita mereka dapat tercapai.



Wakil Ketua Taufik Kurniawan saat menyerahkan cinderamata dari DPR kepada perwakilan dari Forum Pelajar Indonesia

“Para pelajar harus dapat memilah informasi secara selektif dan positif khususnya yang dapat menunjang belajar apabila informasi mengandung fitnah jangan diambil,” papar Taufik saat memberikan sambutannya kepada 250 pelajar berprestasi yang tergabung didalam Forum Pelajar Indonesia, di Ruang Operation Room, Selasa, (5/7).

Melalui cara ini, tambahnya, era keterbukaan dan internet dapat memberikan manfaat kepada para pemuda sehingga mereka dapat lebih siap menerima tongkat estafet kepemimpinan di masa mendatang. “DPR menyambut positif launching Pelajar Parlemen Indonesia, kita akan terus mendukung poin mana saja yang bisa dimanfaatkan oleh pelajar,” lanjutnya.

Dia mengatakan, pada zaman pergerakan banyak tokoh-tokoh pergerakan atau politik berasal dari pelajar atau cendekiawan. “Mereka semua adalah pelajar karena itu kita

yakin di era keterbukaan ini para pelajar sekalian dapat menjadi politisi yang matang,” jelasnya.

Menurutnya, DPR sekarang telah menjadi penyeimbang sistem check and balances dari trias politika. Di era tertutup kita tidak mengetahui sepak terjang anggota dewan, sekarang ini di era reformasi, setiap media massa dapat memberitakan tentang dewan dari sisi ‘keksesian beritanya” artinya berita yang dapat menggigit opini publik yang dasyat biasanya berita mengenai pribadi sosok tokoh politisi. “Posisi DPR sekarang ini sebagai penyangga demokrasi dimanapun didunia, demokrasi yang maju seperti Amerika Serikatpun, harus memiliki check and balances,” jelasnya.

Sekarang ini, dunia informasi tidak terbatas. bahkan lewat Twitter, Facebook kita dapat memantau perkembangan mengenai Amerika Serikat. “Saat ini pengajar, maupun orangtua memiliki tugas yang berat dibandingkan era 1980 lalu, dahulu acara atau

tayangan televisi cuma satu saluran, sekarang melalui teknologi satelit kita bisa menyaksikan berbagai acara di belahan dunia,” katanya,

Fungsi DPR, lanjutnya, yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran, Saat ini, Selasa, (5/7) Paripurna DPR sedang membahas anggaran mulai dari nilai mata uang, inflasi dan sebagainya. “Sekarang semua pejabat seperti bupati, walikota jangan memainkan uang rakyat tanpa disertai transparansi anggaran, kita optimis kedepan makin banyak orang yang memiliki kredibilitas dan transparan,” ujarnya.

Menyinggung maraknya kasus koruptor yang melibatkan anggota Dewan, Taufik menilai cepat atau lambat maupun sekecil apapun tindakan korupsi harus segera ditindak dan dihukum apabila terbukti bersalah. “Saya yakin bila dahulu sudah ada KPK maka kasus sebesar BLBI tidak mungkin terjadi,” tutupnya. (si)/foto: iw/parle.

**

Taufik Kurniawan Nilai Pelajar Indonesia Kritis

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dihujani pertanyaan saat menerima 250 pelajar dari seluruh tanah air yang tergabung dalam kegiatan Forum Pelajar Indonesia.

Usai menyampaikan paparan dihadapan para peserta di Operation Room, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2011) hampir semua tangan mengacung ingin menyampaikan pertanyaan, padahal kesempatan hanya diberikan kepada 5 penanya.

“Wah pertanyaannya berat-berat ya, kritis, hampir seperti pandangan fraksi di DPR,” komentar Taufik Kurniawan usai mendengar pertanyaan dari peserta. Ia menilai banyak pelajar dari seluruh daerah di tanah air yang memiliki prestasi yang patut diacungi jempol. Baginya masa depan bangsa ada pada pelajar sambil menyebut fakta, tokoh nasional Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang berasal dari pelajar yang memiliki kemampuan ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan yang mengejutkan Wakil Ketua DPR itu diantaranya disampaikan Ayu Mariza pelajar SMA IGM Palembang, “Menurut Bapak apa ada cara lain menyampaikan aspirasi selain demo?” Sedangkan Edison pelajar dari Morowali, Sulawesi Tengah mempertanyakan korupsi masih marak di negeri ini padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dibentuk. Sementara Zahra pelajar SMAN 42 Jakarta meminta penjelasan tentang UN. “Kenapa pemerintah tetap nekad melaksanakan UN padahal hakim MA sudah menolaknya,” tandasnya.

Taufik yang juga politisi PAN ini meminta peserta Forum Pelajar Indonesia yang memiliki prestasi dibidang masing-masing, seperti penulis karya ilmiah, nilai akademik serta prestasi olah raga terbaik terus belajar dan pada saatnya menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Taufik



Suasana Forum Pelajar Indonesia di Operation Room Nusantara I DPR

berjanji akan terus mendukung pelajar dari DPR, seperti meminta pemerintah untuk selalu memberikan beasiswa untuk pelajar berprestasi. “Agar keberhasilan mereka tidak hilang begitu saja diterpa angin,” imbuhnya.

Pada bagian lain ia juga mengingatkan agar para pelajar memiliki kemampuan dalam memilah-milah informasi. Salah satu dampak dari era keterbukaan adalah munculnya berita media yang mengedepankan ‘keseksian’ berita. Tidak jarang berita seperti ini mempengaruhi opini publik karena menyangkut kepribadian dan masalah internal para politisi.

Peluncuran Program Parlemen Pelajar Indonesia

Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berkeinginan meluncurkan program Parlemen Pelajar Indonesia yang merupakan bagian dari kegiatan Forum Pelajar Indonesia selanjutnya. “Saya menyambut positif peluncuran program Parlemen Pelajar Indonesia. DPR mendukung

sepenuhnya karena bermanfaat untuk mensosialisasikan program legislasi kepada pelajar. Produk legislasi DPR banyak, tapi ada juga yang dibatalkan MK. Parlemen Pelajar dapat menjembatani bagaimana memahami kiprah DPR pada era reformasi sekarang ini,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin setiap tahunnya dan melibatkan pelajar dari seluruh Indonesia. “Agar adik-adik pelajar bisa kenal DPR jangan hanya lewat koran, lewat TV, dari berita yang seolah-olah menggambarkan DPR ini sarang penjamun, dan penjahat. Ini DPR kita semua, DPR adik-adik juga,” demikian Taufik.

Sementara itu Pembina Forum Pelajar Indonesia, Fajar Kurniawan menjelaskan kegiatan 250 pelajar berprestasi dari seluruh provinsi ini akan berlangsung selama 1 minggu di Jakarta. Beragam acara telah disiapkan diantaranya kunjungan ke kantor lembaga negara, dialog dengan tokoh nasional lintas profesi, penanaman pohon serta pentas seni budaya Indonesia. (iky)/foto:iw/parle.



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menerima 250 pelajar dari seluruh tanah air yang tergabung dalam Forum Pelajar Indonesia. di Operation Room, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Juli 2011. foto:IW



Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344 dan Layanan Informasi Publik di www.ppid.dpr.go.id / www.pengaduan.dpr.go.id